**WARISAN SIKAP TOLERAN MASA KESULTANAN BANJAR DAN
KEBERLANJUTANNYA UNTUK MASYARAKAT LOKAL SEKARANG**
*The Tolerant Heritage from Banjar Sultanate And Its Sustainability Among Local
Community Nowadays*

Wasita

Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, Jalan Gotong Royong II, Rt 3, Rw 6, Kelurahan Mentaos,
Banjarbaru 70714
E-mail: wasita6@yahoo.com

Naskah diterima: 10 September 2020 - Revisi terakhir: 11 Desember 2020
Disetujui terbit: 11 Desember 2020 - Tersedia secara online: 28 Desember 2020

Abstract

The result of this study is intended to prove that the Banjarese have the right attitude of tolerance, supported by archaeological evidences. In this regard, the research question is, how the tolerance implemented by the Banjar community, recorded in archaeological data, and how local people inherit and implement it in their life nowadays? This research used a descriptive method with inductive reasoning. The data were described as well as being placed in the historical timeline of the Banjar Sovereignty. Tolerance data are indicated by the group diversity (at least two groups) existed in the same time and locus, and both have a relationship. Furthermore, tolerance is evidenced by the attitude of the ruler who was willing to tolerate, not suppress, and give proper rights. This study's results indicate that archaeological evidence had been supported by historical literature, which showed that the Banjar people have strong historical roots of tolerance. The people of South Kalimantan can continue the implementation of that tolerance in a life of diversity presently. It can be concluded that the history of tolerance that has been practiced since our ancestors must be maintained by continuously dialogued so that it can be implemented in an appropriate space and time context.

Keywords: tolerance, historical literature, archaeological data, Banjar Sultanate, Banjar society

Abstrak

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa masyarakat Banjar memiliki sikap toleransi yang baik, yang didukung oleh bukti-bukti arkeologi. Berkaitan dengan itu, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana toleransi itu diimplementasikan oleh masyarakat Banjar yang terekam pada data arkeologi dan bagaimana masyarakat sekarang mewarisi sekaligus mengimplementasikannya dalam kehidupan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penalaran induktif. Data dideskripsikan sekaligus ditempatkan dalam *timeline* sejarah Kesultanan Banjar. Data toleransi ditunjukkan dengan adanya keberagaman (minimal dua kelompok) yang keberadaannya pada waktu dan lokus yang sama, serta keduanya memiliki hubungan. Selanjutnya toleransi dibuktikan dengan adanya sikap dari pihak yang berkuasa rela mentolerir, tidak menekan, dan memberikan hak yang semestinya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya bukti-bukti arkeologi yang didukung oleh literatur sejarah yang memperlihatkan bahwa masyarakat Banjar memiliki akar sejarah toleransi yang kuat. Masyarakat Kalsel sekarang memiliki kesempatan untuk meneruskan implementasi toleransi itu dalam kehidupan keragaman. Dapat disimpulkan bahwa sejarah toleransi yang telah

dipraktikkan sejak nenek moyang itu harus dirawat, terus-menerus didialogkan agar bisa diimplementasikan dalam konteks ruang dan waktu yang sesuai.

Kata kunci: toleransi, literatur sejarah, data arkeologi, Kesultanan Banjar, masyarakat Banjar

PENDAHULUAN

Toleransi berkaitan dengan sikap menghargai, menghormati, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok atau golongan lain. Menurut Preston King (1998: 21), toleransi adalah pengekangan diri yang mengharuskan orang yang menoleransi secara sukarela menghargai hal yang tidak disukai, tidak disetujui, sekalipun seseorang itu memiliki kekuatan untuk tidak mentolerir. Pernyataan ini menunjukkan adanya dua hal pokok dalam toleransi, yaitu kesadaran penuh dan sikap tidak akan mengganggu. Tanpa dua hal tersebut toleransi tidak akan pernah terjadi. Kebalikan dari pernyataan King disebut intoleran.

Lebih tegas Powell dan Clarke (2013: 19) menyebutkan bahwa intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh prasangka. Biasanya prasangka memiliki tiga komponen, yaitu (1) kognitif, yang mencakup stereotip terhadap kelompok luar yang direndahkan, (2) afektif, yang berwujud tidak suka terhadap kelompok luar, dan (3) tindakan negatif terhadap anggota kelompok luar, baik secara interpersonal maupun dalam hal kebijakan politik dan sosial.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tingkat toleransi di masyarakat lokal Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan keadaan yang wajar dan tidak terlihat adanya ketegangan-ketegangan di masyarakat. Namun demikian, hasil survei Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014, menunjukkan bahwa tingkat toleransi masyarakat Kalsel hanya 0,01. Nilai tingkat toleransi Kalsel berbeda jauh dengan Kalimantan Utara yang mencapai angka 0,62 dan menempati posisi tertinggi secara nasional (Sumaktoyo, 2018). Sejalan dengan hasil survei itu, diduga bahwa pada sebagian masyarakat terdapat benih-benih intoleran. Hasil survei Setara Institute menunjukkan bahwa Banjarmasin mendapatkan nilai 3,55 yang menempati posisi ke-8 sebagai kota intoleran di Indonesia (Anonim, 2017).

Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa sikap intoleran tidak memiliki akar yang kuat pada perjalanan sejarah masyarakat Banjar (pribumi di Kalsel). Jika belakangan ini terdapat hasil penelitian yang memperlihatkan nilai toleransi masyarakat Kalsel sekarang (pribumi dan pendatang) rendah, hal itu diduga benihnya bukan dari masa lalu. Sebaliknya, diyakini bahwa masyarakat Banjar memiliki riwayat toleransi yang baik. Klaim yang demikian itu didukung oleh data sejarah dan dikuatkan oleh bukti-bukti arkeologi. Dengan perspektif arkeologi-sejarah, tulisan ini ditujukan untuk melengkapi kekurangan tema penelitian toleransi dalam ranah arkeologi, utamanya pada masyarakat Banjar dan Kalsel pada umumnya. Di sisi lain, toleransi sebagai warisan perlu dilestarikan dengan cara dipraktikkan dalam kehidupan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana toleransi itu diimplementasikan oleh masyarakat Banjar yang terekam pada data arkeologi dan bagaimana sikap yang harus diambil oleh masyarakat sekarang untuk bisa mewarisinya sekaligus mengimplementasikannya dalam kehidupan?

Sejauh ini penelitian yang bertemakan toleran-intoleran cenderung memfokuskan

pada dua aspek yaitu pengajaran dan sejarah. Penelitian pada aspek pengajaran menggambarkan bahwa nilai agama dan budaya yang diterapkan dengan baik, dapat meminimalisir intoleran (Berger, Gelkopf, Heineberg, & Zimbardo, 2016). Sebaliknya, jika dilihat dari sisi positif, penerapan nilai agama dan budaya dengan baik, dapat meningkatkan toleransi di kalangan para siswa (Arifin, Musaddad, & Sudiyanto, 2019).

Kedua, aspek sejarah, sejauh ini hasil penelitian dari aspek ini untuk melihat terjadinya intoleran dari akar permasalahannya. Hal ini diperlihatkan secara historis oleh Belanda yang menindas masyarakat di wilayah jajahannya. Di sisi lain, dalam kemitraan dengan perusahaan, Belanda merekrut pekerja dari Turki serta Maroko, dan terhadap mereka diberlakukan kebijakan multikultural progresif. Langkah itu memperlihatkan bahwa Belanda memiliki sejarah toleransi ambivalen yang menimbulkan kesulitan bagi kelompok tertentu di bidang pendidikan dan pekerjaan. Dampak yang demikian masih dapat dirasakan hingga saat ini oleh minoritas di Negeri Kincir Angin (Weiner, 2015). Berdasarkan aspek ini, diduga bahwa kompleksitas kelompok atau golongan dan juga ambivalensi telah menjadi penyebab munculnya kasus intoleran terhadap minoritas (Goalwin, 2018). Sementara itu, peneliti lain menunjukkan bahwa intoleran dapat dilakukan terhadap kelompok-kelompok luar karena dipengaruhi oleh pemaknaan arti-penting identitas nasional, keamanan, dan ideologi politik (Moore, 2000).

Penelitian Goalwin (2018) dilakukan di Turki membahas kompleksitas identitas sosial dan akar intoleransi beragama. Penelitiannya menunjukkan bahwa Kekaisaran Ottoman telah menciptakan kompleksitas identitas sosial yang rendah, yaitu menyaring dan menyederhanakan berbagai aspek identifikasi menjadi satu. Penyederhanaan itu mengakibatkan tumpang tindih beberapa aspek identitas. Bagian akhir penelitiannya memperlihatkan bahwa etnis dan agama mayoritas telah menginspirasi intoleransi terhadap minoritas.

Penelitian Moore (2000) dilakukan di Israel membahas tentang sikap intoleran yang diperlihatkan oleh siswa sekolah menengah Yahudi dan Palestina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Israel 80% orang Yahudi dan 20% orang Palestina. Dalam berbagai hal keduanya dibedakan dalam sebutan Israel (Yahudi) dan Arab (Palestina). Sebutan kebangsaan pun, kalau dilihat di kalangan masyarakat, dibedakan menjadi bangsa kita dan bangsa mereka. Dikotomi dalam garis besar yang menempatkan Arab-Israel dilandasi kebencian karena sikap politik, identitas, dan religiusitas.

Tema penelitian toleran dan intoleran yang dipilih oleh para peneliti di atas dibahas berdasarkan disiplin sejarah, sementara itu dalam disiplin arkeologi belum banyak dilakukan. Tema penelitian demikian dari disiplin arkeologi tidaklah mudah. Oleh karena itu, untuk menjembatannya digunakan data dari dua disiplin tersebut. Dalam perspektif arkeologi, Hariani Santiko (2013: 4–5), meneliti penerapan sikap toleran yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi warganya. Dengan mengambil Berdasarkan sumber dari kakawin Ngarakertagama, peneliti ini menyebutkan bahwa warga Kerajaan Majapahit antara lain ada yang berasal dari bangsa luar, yaitu orang dari Jambudwipa (India), Kambuja, Cina, Yawana, Champa, Goda (Bengal?), Syamka dan lain-lain. Dalam rangka mengakomodir keperluan mereka, Majapahit mengangkat *juru kling* yang diberi tugas mengkomunikasikan hak dan kewajiban orang asing yang menjadi warga kerajaan. Selain berkaitan dengan asal warganya, pemerintahan Majapahit juga mengambil kebijakan terkait adanya beberapa

agama yang berkembang di kerajaan, yaitu dengan meminta masing-masing pemeluknya agar saling menghormati dan mencegah terjadinya konflik.

Masih terkait dengan Kerajaan Majapahit, hasil penelitian Faizul Maghfiroh (2019) menyebutkan bahwa kerajaan Hindu tersebut sebagian warganya ada yang beragama Islam. Masuk dan tersebarnya Islam ke Majapahit karena peran wali atau *mullah*, perdagangan, dan perkawinan. Bukti adanya orang Islam di sekitar wilayah dan di pusat Kerajaan Majapahit adalah ditemukan tinggalan arkeologi bernafaskan Islam, misalnya makam. Islam bisa diterima karena Majapahit menerapkan keberagaman dalam kesatuan, yang tertuang dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrva*. Semboyan yang melatari peristiwa masuknya Islam di Majapahit menunjukkan bahwa hal baru yang di sampaikan dengan cara damai, justru menambah khazanah budaya masyarakat setempat. Sikap penguasa yang diwujudkan dalam semboyan yang mengakomodir dan melindungi telah menempatkan Majapahit sebagai kerajaan yang menjunjung sikap toleran.

Penelitian dengan tema toleransi juga dilakukan oleh Naniek Harkantiningasih (2017: 241) yang berhasil menunjukkan bahwa Keraton Kasepuhan (Cirebon) dan Masjid Abang Panjunan, terdapat keramik dengan hiasan yang menggambarkan cerita Alkitab. Keberadaan keramik yang demikian itu diklaim oleh peneliti tersebut sebagai adanya wujud toleransi. Memang diakui bahwa antara pembangunan awal objek kajian dan usia keramik tidak sama. Keraton Kasepuhan dan Masjid Abang Panjunan dibangun pada abad 15 sedangkan hiasan keramiknyanya dari abad ke-17 – 19. Akan tetapi pada abad tersebut penerus Keraton Kasepuhan masih memfungsikan keduanya, jadi di sinilah konteks toleransi itu terjadi.

Sementara itu, M. Pinem (2013) menyebutkan bahwa hasil penelitian arsitektur Masjid Pulo Kameng di Aceh terdapat makna filosofi, yaitu adanya nilai-nilai akulturasi dan toleransi. Hal itu ditandai dengan adanya pengaruh budaya Cina pada kubah masjid berbentuk pagoda dan atap tumpang sebagai pengaruh budaya Hindu-Buddha dari Jawa. Dua bukti itu yang dimaksudkan bahwa telah terjadi toleransi dalam masyarakat Aceh sejak pendirian masjid tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penalaran induktif. Metode deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data arkeologi yang keberadaannya dalam periode tertentu yang didukung oleh data sejarah. Data yang dimaksudkan adalah sikap toleran yang berasal dari masyarakat Banjar masa lalu. Toleransi dalam data arkeologi berupa bukti-bukti arkeologi yang berkaitan dengan adanya sikap menghormati kelompok lain. Bukti arkeologi yang demikian ini ditunjukkan oleh material budaya yang kehadirannya tidak mengganggu kelompok lain.

Sebagai sebuah penelitian arkeologi yang ingin menunjukkan adanya sikap toleran pada masyarakat dan Kesultanan Banjar (sekarang di Provinsi Kalimantan Selatan) dan bagaimana keberlanjutan serta penerapannya di masa kini, maka data yang dikumpulkan adalah sikap masyarakat dan kesultanan terhadap orang atau kelompok atau masyarakat etnis lain pada masa itu. Penelitian ini objeknya terjadi di masa lalu, maka data sikap dan perilaku itu dikumpulkan dari data sejarah dan data material/arkeologi.

Data tersebut dideskripsikan dengan cara menunjukkan keberagaman yang dibuktikan oleh data arkeologi. Toleransinya dibuktikan dengan adanya keberagaman (minimal dua kelompok) yang keberadaannya pada waktu dan lokus yang sama, serta

keduanya memiliki hubungan (Wasita, 2018), dan pihak yang berkuasa rela untuk mentolerir, tidak menekan, dan memberikan hak yang semestinya.

Bukti kehadiran keduanya secara bersamaan yang ditunjukkan oleh data usia yang setara, dan dukungan data sejarah (literatur sejarah) yang menunjukkan keduanya berasal dari periode yang sama. Selanjutnya, data disusun dengan cara memetakan temuan arkeologi ke dalam *timeline* Kesultanan Banjar (Kesultanan Banjarmasin). Setelah penyusunan data dilanjutkan dengan analisis untuk ditunjukkan adanya sikap toleran berdasarkan bukti arkeologi. Adanya sikap toleran harus dibuktikan dengan menunjukkan bahwa keduanya ada kontak dan sikap yang menghargai. Kontak ditunjukkan oleh adanya bukti-bukti arkeologi berupa keragaman di suatu wilayah dalam periode waktu yang sama. Sementara itu sikap menghargai dibuktikan dengan adanya beberapa kelompok (minimal dua kelompok) masyarakat yang hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dibuktikan oleh keragaman tinggalan arkeologi di suatu lokus tertentu yang didukung oleh bukti sejarah (literatur sejarah). Setelah pembuktian adanya sikap toleran kemudian ditindaklanjuti dengan pencarian nilai-nilai positifnya yang masih relevan dan peluangnya untuk diterapkan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Sejarah

Toleran dan intoleran berkaitan dengan sikap orang, golongan, atau masyarakat kepada orang, golongan, atau masyarakat lain. Dalam tulisan ini masyarakat Banjar merupakan pribumi, sekaligus penguasa (pemegang kekuasaan di Kesultanan Banjar) dihadapkan pada masyarakat pendatang yang ditolerir (misalnya Cina dan Arab). Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat dibuktikan dalam sebagian isi surat-surat perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (V.O.C.). Dalam perjanjian yang dibuat tahun 1756 tersebut ditegaskan bahwa pedagang asing (Cina, Arab, Bugis, Bali, Mandar, dan Jawa) dilarang membawa lada keluar dari Banjarmasin secara sembunyi-sembunyi. Semua harus sepengetahuan sultan, dan pemeriksaan di lapangan dilakukan oleh Belanda (Anonim, 1965: 51)

Informasi tentang Banjarmasin dan etnis non-Banjar yang menetap di sana, juga diperoleh dari catatan Belanda. Pada tahun 1607 Belanda menugaskan Gillis Michielszoon untuk menjajagi hubungan dagang dengan Banjarmasin, tetapi gagal. Kesultanan memilih menjalin hubungan dagang dengan Cina karena mereka membeli lada dengan harga yang lebih tinggi. Misi Belanda yang diulangi pada tahun 1633 (Kesultanan Banjar telah pindah ke Kayutangi, di Martapura) berhasil, tetapi selama bertahun-tahun kegiatan perdagangannya selalu diwarnai dengan kekerasan (Dijk, 1862: 1 dan 14).

Jika perdagangan dengan Belanda diwarnai kekerasan, maka berbanding terbalik dengan Cina. Hasil penelitian M. Idwar Saleh (1977: 28) menyebutkan bahwa pada abad ke-17 telah hadir pedagang Cina di wilayah Kesultanan Banjar. Berdasarkan catatan Dinasti Ming pada kisaran abad ke-17, Groeneveldt (2018: 119) menyebutkan bahwa pedagang Cina yang menikah dengan orang lokal akan tetap tinggal di kampung pasangannya. Tidak hanya Cina, Hollander juga menyebut etnis Arab, Bengali dan Bugis melakukan perdagangan dan hidup menyatu dengan masyarakat setempat. Dampak pilihan hidup demikian terlihat pada akhir abad ke-17, yaitu penduduk Bakumpai (sekarang Marabahan) terdiri dari ras campuran Dayak, Melayu, Arab, Bengali, Bugis,

dan Cina. Bahkan karena kebiasaan etnis Cina membereskan kewajiban-kewajibannya, mereka diberi hak menambang intan dan emas di Angsau, Pelaihari. Hak itu diberikan oleh Kesultanan Banjar setelah kewajiban membayar ijin tambang dilunasi (Hollander, 1877: 140 dan 153).

Lebih dari itu, junk-junk (kapal-kapal besar) pedagang Cina telah sampai di Banjarmasin pada tahun 1700-1737. Sebagian dagangan yang dibawa belum pernah ada di masyarakat (misalnya piring dari bahan keramik) dan itu sangat disukai. Para pedagang Cina jika kembali ke negaranya membawa dagangan lokal, misalnya lada. Pedagang Cina bersedia membeli lada dengan harga tinggi sehingga kegiatan dagangnya disukai penduduk pribumi (Fong, 1969: 205–236).

Uraian di atas merupakan fase awal kedatangan orang Cina dan yang lainnya ke tanah Banjar. Kedatangan imigran gelombang kedua terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Karena adaptasi, dan kemauan memperbaiki diri (terutama menyangkut pelayaran), imigran Cina berhasil merebut penguasaan dagang Bugis yang kala itu mendominasi ekspor tradisional (Lindblad, 2012: 11).

Keberadaan orang asing di wilayah Kesultanan Banjar pada masa gelombang kedua dapat ditelusuri dari catatan Belanda saat perekrutan militer. Dalam literatur sejarah tahun 1858 disebutkan bahwa penduduk asli yang berusia 18-30 tahun jika berminat, diperbolehkan melamar menjadi anggota militer. Orang yang bukan dari penduduk pribumi, seperti Cina, Arab, dan orang asing dari timur lainnya, tidak diperbolehkan melamar (Ludeking, 1871: 175).

Pada masa pemerintahan Sultan Adam (1825-1857), melalui sumber tertulis diketahui bahwa orang non-Banjar yang menjalani kehidupan di wilayah Kesultanan Banjar, adalah Jawa, Australia, Bengalen, Cina, dan Arab (Bleeker, Munnich, & Netscher, 1855: 47 dan 569). Masih dalam pemerintahan yang sama, keberadaan orang Cina, Arab, Bali, Jawa, dan Bugis disebut lagi dalam perjanjian No. 10 tanggal 04 Mei 1826. Selanjutnya, dalam perjanjian tanggal 18 Maret 1845 tentang wilayah Kesultanan Banjar, disebut juga posisi Kampung Arab dan Pecinan di Banjarmasin (Anonim, 1965: 231 dan 249–251). Banyaknya orang Cina di Banjarmasin juga digambarkan oleh Schwaner (1853: 55) berupa sejumlah rumah-rumah di kampung Pecinan (Gambar 1).

Gambar 1. Situasi Kampung Cina di Banjarmasin (Sumber: Schwaner, 1853: 55).

Dalam konteks ini, saudagar-saudagar Cina tetap memiliki peran penting. Mereka terlibat dalam perdagangan dan negosiasi dengan bangsawan Kesultanan Banjar. Para saudagar Cina memilih bermukim di Pacinan Laut dan Pacinan Darat yang lokasinya berseberangan dengan Benteng Tatas. Lokasi itu juga dekat dengan kompleks istana

Sultan Adam di Sungai Mesa, Banjarmasin. Hubungan Cina dengan istana semakin dekat setelah salah seorang putra Sultan kawin dengan perempuan berdarah Cina-Dayak, yaitu Nyai Dawang (Nyai Aminah) dari Pacinan (Sjamsuddin, 2014: 95).

Di wilayah Kesultanan Banjar terdapat penduduk dari berbagai etnis (Tabel 1). Kemajemukan itu dirawat berdasarkan Undang-undang Sultan Adam yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu isi undang-undang itu menegaskan bahwa siapa saja boleh bercocok tanam di suatu areal yang tidak sedang digarap oleh seseorang (Bondan, 1953: 154). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kesultanan Banjar menerima siapa pun, termasuk pendatang, yang hendak mencari rezeki di wilayah kekuasaannya (Wasita, 2008: 257).

Tabel 1. Keberadaan etnis non-Banjar pada masa Kesultanan Banjar

Pemegang pemerintahan dan abad/tahunnya	Etnis	lokasi bermukim	Profesi
Sultan Inayatullah, Sultan Saidullah, dan Sultan Amrullah Bagus Kasuma (Abad 17)	Cina	Kampung Cina Parit, Pelaihari	Penambang intan dan emas
Sultan Adam (1825-1857)	Cina	Pecinan Laut dan Darat, Banjarmasin	Pedagang
Sultan Tamjidillah (1857-1859)	Cina	RK Ilir, Banjarmasin	Pedagang
Sultan Adam (1825-1857)	Arab	Kampung Arab, Antasan Kecil Barat	Pedagang
Sultan Tamjidillah (1857-1859)	Bugis	Sulit ditemukan di lapangan. Peta tahun 1900	Pedagang
Sultan Adam (1825-1857)	Mandar	menyebut kampung Bugis (sekarang sekitar Jalan Sulawesi), tetapi tidak ditemukan tinggalan materialnya.	
Sultan Tamjidillah (1857-1859)	Bali Jawa Palembang		

Sumber: Penulis, dirangkum dari berbagai sumber.

Paparan Data Arkeologi

Berdasarkan data sejarah yang disebutkan di atas, data arkeologi di lapangan ternyata juga menunjukkan relevansi. Berkaitan dengan jejak penambangan intan dan emas di Desa Angsau, Pelaihari oleh orang Cina, saat ini masih dapat ditemukan areal bekas tambang dan rumah tua warisan pendahulunya, serta penghuninya yang berasal dari etnis Cina. Bekas lokasi tambang tersebut pada saat ini hanya terlihat sebagai hamparan yang agak rendah dan tergenang air. Sebagian hamparan itu berupa sungai dengan genangan airnya lebih dalam daripada sekitarnya. Berkaitan dengan kawasan permukiman Cina, saat ini masih terdapat empat rumah tua di Kampung Cina Parit (Tim Peneliti, 2010: 12–16).

Salah satu penghuni rumah di Kampung Cina Parit adalah Ibu Nyoo. Beliau adalah salah satu keturunan dari orang tua yang berasal dari Cina yang datang ke Pelaihari untuk melakukan penambangan. Keluarga ini tinggal di rumah adat Banjar yang diperkirakan dibangun sejak 200 tahun lalu. Menurut penuturan beliau dan Bapak Phoe (saudara Ibu Nyoo), pada tahun 1974, di kampungnya masih terdapat 24 marga Cina yaitu: Go, Tan, Tjioe, Lim, Tong, Pang, Law, Tjia, Tho, Phoe, Hoo, Nyoo, Oey, Tjong, Yap, Thio, Kwe, Tjeng, Oe, The, Tjoe, Cie, Kho, dan Lic. Sekarang sebagian besar orang Cina tersebut

telah pindah dan menjual tanah beserta rumahnya kepada orang lain (BPCB Kaltim, 2018).

Salah satu rumah adat Banjar yang masih tersisa di Kampung Cina Parit di Jalan Parit Mas, Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan adalah rumah adat tipe *tadah alas*. Ciri terkuat dari tipe rumah ini adalah adanya bentuk limasan kecil pada atap bagian depan (Gambar 2). Ciri demikian tidak dimiliki oleh jenis rumah yang lain, maka dapat dipastikan bahwa rumah ini adalah tipe *tadah alas*. Pada masa-masa awal, yaitu ketika Kesultanan Banjar masih eksis, rumah tipe seperti ini penggunaannya adalah rakyat biasa. Pengecekan di lapangan terhadap informasi literatur sejarah yang menyebutkan bahwa orang Cina, Arab, dan Bugis yang hidup

Gambar 2. Rumah tipe *tadah alas* di Kampung Cina Parit, Pelaihari (Sumber: BPCB Kaltim, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/rumah-tradisional-banjarmasin/>).

berbaur dengan masyarakat Bakumpai, tidak bertemu dengan orang-orang pendatang. Data lapangan menunjukkan bahwa masih bisa ditemukan objek material berupa rumah joglo, tetapi penghuninya orang Dayak. Sekarang ini, rumah-rumah lama itu masih dapat ditemukan di Jalan MT. Haryono dan Jalan Pangeran Wangkang, Marabahan. Kedua jalan tersebut berada di tepi Sungai Barito

Walaupun di lokasi tersebut banyak rumah-rumah tua (arsitektur vernakuler Banjar), tetapi tidak satupun warga Cina yang masih tinggal di perkampungan tersebut. Kalau memperhatikan tipe rumahnya, paling tidak terdapat dua rumah joglo (Gambar 3). Menurut Widiastuti dan Oktarina (2012: 8) rumah tipe ini biasa digunakan oleh orang Cina untuk tempat tinggal dan bagian kolong rumah yang tinggi dan besar ukurannya, biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan. Hal ini tidak mengherankan karena orang Cina biasanya berprofesi sebagai pedagang. Keberadaan orang luar yang

Gambar 3. Rumah joglo di Jalan Pangeran Wangkang, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (sumber: <https://www.google.com/maps/@-2.9826246,114.7734376,3a,87.2y,268.68h,91.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1smzw0-KdgyQUSoboBzUR23A!2e0!7i16384!8i8192>)

menetap di wilayah Kesultanan Banjar, terutama di Banjarmasin, menurut literatur sejarah adalah orang dari etnis Cina, Arab, Jawa, dan Sulawesi/Bugis. Kelompok-kelompok etnis ini ada yang bermukim di lokasi yang sama dan nama kampungnya sesuai dengan identitasnya, misalnya Kampung Cina/Pecinan dan Kampung Arab. Kampung Cina di Banjarmasin masih dapat dikunjungi di seberang Benteng Tatas, yaitu Pecinan Laut, dan Pecinan Darat.

Perkampungan Pecinan Laut sekarang berada di sekitar Jalan Kapten Piere Tendean. Sekarang ini rumah-rumah Cina yang masih tersisa, memang tidak menunjukkan usia yang setara dengan masa pemerintahan Sultan Adam yaitu kisaran tahun pada 1825-1857. Sekarang ini, rumah etnis Cina yang masih bisa dilihat diperkirakan berasal dari tahun 1800-an akhir bahkan ada yang berasal dari tahun 1920-an.

Rumah Cina yang diperkirakan berasal dari 1800-an akhir adalah rumah yang sekarang ditempati oleh Ibu Yul. Angka tahun itu pun hanya perkiraan, karena sejauh ini angka tahun tersebut didapatkan oleh Ibu Yul berdasarkan cerita dari orang tuanya. Orang tua Ibu Yul juga mendapat cerita dari bapak-ibunya, atau kakek-nenek Ibu Yul. Dugaan umur rumah tersebut dibenarkan tetangganya. Bahkan tetangga tersebut juga tahu bahwa mereka tidak membangun, tetapi rumah joglo tersebut dibeli dari orang lain.

Dalam kategori rumah vernakular Banjar, joglo adalah rumah panggung yang denahnya hampir persegi, atapnya tinggi di bagian tengah dan hampir datar serta melebar di keempat sisinya. Biasanya penghuni rumah joglo adalah pedagang Cina. Rumah joglo di Jalan Kapten Piere Tendean, selain rumah Ibu Yul, terdapat satu rumah lagi yaitu di Gang Benawa. Rumah ini kondisinya lebih bagus daripada rumah Ibu Yul.

Masih di Jalan Kapten Piere Tendean, terdapat dua rumah lagi yang dahulu dimiliki oleh orang Cina, tetapi sekarang telah dibeli oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Sekarang dua rumah yang disebut terakhir, telah direhap total dan dimanfaatkan untuk gedung pertemuan. Pemanfaatan lain adalah untuk meramaikan pariwisata siring Banjarmasin dengan dijadikan sebagai tempat penjualan cinderamata.

Bukti permukiman etnis Cina di Banjarmasin (biasa disebut Cina Banjar) berikutnya adalah Kampung Pecinan Darat di sekitar Jalan Ade Irma Suryani (AIS) Nasution. Akan tetapi di lokasi tersebut, tinggalan arkeologi yang berupa rumah lama tidak banyak lagi yang tersisa. Salah satu yang masih bisa dilihat adalah rumah Bapak Dul (nama Banjar), sementara itu yang di Jalan Veteran terdapat Klenteng Sutji Nurani (Gambar 4).

Gambar 4. Klenteng Sutji Nurani di Jalan Veteran, Banjarmasin (Sumber: Dokumen Wasita, 2017).

Kampung Cina lainnya yang ada di Banjarmasin terdapat di Jalan RK Ilir. Di tempat ini rumah-rumah lama yang menjadi hunian orang Cina tidak banyak. Sejauh ini yang masih dapat ditemukan adalah satu rumah berbentuk *palimasan*. Pemilik dan penghuninya orang Cina. Menurut penuturan penghuninya, rumah itu dibangun kurang lebih pada tahun 1890. Kawasan permukiman ini tidak terlalu jauh dengan Klenteng Po An Kiong yang ada di sekitar pasar Harummanis.

Sementara itu, kampung-kampung tempat tinggal orang Bugis, Mandar, Bali, Jawa, dan Palembang yang disebut pada masa pemerintahan Sultan Tamjidillah sulit di temukan di lapangan. Peta Banjarmasin tahun 1900-an menyebut kampung Bugis di sekitar Jalan Sulawesi sekarang. Namun, di lokasi tersebut sekarang tidak ada tinggalan material yang bercirikan dari etnis Bugis.

Satu-satunya Kampung Arab di kawasan yang dahulu pernah merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar adalah Kampung Antasan Kecil Barat. Penduduk keturunan Arab banyak terdapat di lokasi ini, walaupun tinggalan material berupa rumah lama tidak banyak dijumpai. Pada saat pengumpulan data, ditemukan tiga rumah lama yang dihuni etnis keturunan Arab. Kalau diperhatikan tipenya dan dihubungkan dengan pentipean yang diajukan oleh Syamsiar Seman, rumah-rumah di Antasan Kecil Barat itu tidak sepenuhnya menyerupai tipe pakem yang ada. Selanjutnya, secara keseluruhan *timeline* dan peristiwa yang terkait dengan toleransi dapat dilihat pada gambar 5, dan persebaran lokasi perkampungannya etnis pendatang di Banjarmasin dapat dilihat pada peta di Gambar 6.

Gambar 5. *Timeline* dan peristiwa yang terkait toleransi di Kesultanan Banjar (Sumber: penulis, rangkuman dari berbagai sumber).

Gambar 6. Lokasi kampung pendatang di Banjarmasin pada masa Kesultanan Banjar, A: Kampung Cina di RK Ilir, B: Kampung Pecinan Laut dan Pecinan Darat, C: Kampung Bugis. Dimodifikasi penulis. (Sumber: Schetskaart van de Hoofdplaats Bandjermasin en omliggend terrain 1916).

Pembahasan

Paparan data sejarah di atas relevan dengan data arkeologi yang mengungkapkan adanya orang atau etnis non-Banjar di wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Fakta menunjukkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam literatur sejarah, tidak semua dapat ditemukan kembali materialnya di lapangan. Hal itu dimaklumi karena adanya perubahan-perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Akan tetapi, jejak-jejak yang disebutkan dalam literatur sejarah sebagian masih dapat ditemukan di lapangan. Misalnya, keberadaan orang Kampung Cina Parit di Angsau, Pelaihari. Mereka adalah keturunan masyarakat Cina yang dulu datang ke Pelaihari melakukan penambangan emas dan Intan. Sekarang, orang Cina peranakan generasi penerus penambang tersebut sudah tidak banyak lagi.

Kesesuaian catatan orang Belanda saat itu dengan data material menunjukkan sinkronnya data sejarah dengan data arkeologi di lapangan. Fakta yang demikian ini menguatkan upaya Kesultanan Banjar dalam memberikan hak yang sama kepada warganya yang berasal dari berbagai etnis. Jadi toleransi saat itu bukanlah istilah yang dimunculkan sekarang, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Kebijakan sultan tidak ubahnya merupakan implementasi pemberian hak yang sama kepada semua warga. Dengan pemberian hak hidup di tempat baru, beberapa pendatang memilih lokasi bermukim. Permukiman para pendatang itu akhirnya terbentuk dalam nama kampung, misalnya di Angsau, Pelaihari disebut Kampung Cina Parit. Identitas yang menandakan lokasi tersebut sebagai perkampungan orang Cina adalah adanya warga dari etnis Cina. Etnis Cina yang pernah tinggal di kampung tersebut berasal dari 24 marga.

Banyaknya orang Cina yang tinggal di wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar mengindikasikan adanya rasa nyaman dan tidak terganggu. Kenyamanan warga non-Banjar di wilayah kesultanan, tidak hanya dirasakan pendatang yang tinggal di kampung, tetapi juga di Banjarmasin yang merupakan pusat kekuasaan. Ada tiga perkampungan orang Cina di Banjarmasin pada masa kesultanan dan masih bisa dilihat hingga sekarang, yaitu Pecinan Laut, Pecinan Darat, dan Kampung Cina di Jalan RK Ilir sekarang. Pada ketiga kampung tersebut masih dapat ditemukan tinggalan orang Cina berupa toponim

perkampungan, rumah-rumah tua dan masyarakat Cina peranakan.

Orang Cina Peranakan di Banjarmasin sering disebut Cina Banjar. Sebutan ini dianggap mewakili identitas selama berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis di wilayah Kesultanan Banjar (Listiana, 2012: 84). Identitas demikian menunjukkan bahwa mereka dekat dengan kesultanan dan warga Banjar pada umumnya. Kedekatan itu dibuktikan oleh Syahransyah (2015: 47) dengan menyatakan bahwa salah seorang keturunan Cina dinikahi Sultan Muda Abdurrahman. Pernikahan tersebut melahirkan anak diberi nama Pangeran Tamjidillah yang pada saatnya menjadi Sultan Banjar.

Tidak hanya orang Cina tertentu yang dekat dengan kerabat sultan yang akhirnya diterima dengan baik. Orang Cina kebanyakan juga mendapatkan tempat di hati masyarakat Banjar. Hal itu dibuktikan oleh banyaknya pedagang yang menjalin hubungan dagang dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Menurut Hollander (1877: 140) beberapa orang Cina dalam kegiatan dagangnya merasa nyaman hidup membaur bersama masyarakat. Untuk kasus di Bakumpai tidak hanya etnis Cina yang berbaur dengan masyarakat, tetapi juga Melayu, Arab, dan Bugis.

Orang Arab juga merasa nyaman tinggal di Banjarmasin. Mereka membentuk kelompok tinggal yang kemudian lokasinya dinamakan Kampung Arab. Sampai saat ini masih terdapat generasi penerusnya dan tinggal di kampung tersebut. Rumah-rumah lama yang bercirikan arsitektur Banjar yang tidak murni dapat ditemui di kampung itu. Tinggalan itu menunjukkan bahwa mereka juga merasa nyaman dan tidak terganggu selama tinggal di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar.

Sebagaimana orang Cina, orang Arab juga ada yang menikah dengan kerabat Kesultanan Banjar. Mereka memiliki ciri khas pada nama yang digunakan. Anak hasil perkawinan antara kerabat sultan dan orang Arab akan diberi nama Syarif jika laki-laki dan Syarifah jika perempuan (Bleeker *et al.*, 1855: lampiran). Jejak ini menandakan bahwa orang Arab pendatang juga dihargai keberadaannya sebagai warga kesultanan.

Pada catatan orang Belanda, tidak pernah ditemukan adanya konflik antara Kesultanan Banjar dengan pendatang dari Arab, Cina, Bugis, dan Jawa. Tampaknya yang demikian ini terjadi karena para pendatang dapat menyesuaikan. Ketika orang Cina diberi hak untuk menambang di Angsau, Pelaihari, maka kewajiban yang dibebankan kepada mereka adalah membayar ijin penambangan. Kewajiban itu dipenuhi, sehingga pekerjaan penambangan dan bahkan tempat tinggal tidak dipermasalahkan.

Dalam kegiatan perdagangan, orang Cina luwes dan pintar menyesuaikan. Hal-hal yang dibutuhkan masyarakat disediakan para pedagang. Sementara itu ketika membeli hasil pertanian, dilakukan dengan harga yang tidak terlalu rendah. Hal ini yang menjadikan pedagang Cina diterima di kalangan masyarakat.

Oleh karena hak dan kewajiban dilaksanakan para pendatang, tidak heran jika kesultanan kemudian rela membagi kekuasaan dan keistimewaan kepada pendatang. Hak kuasa penambangan yang diberikan kepada etnis Cina adalah salah satu buktinya. Kerelaan kesultanan memberikan sebagian keistimewaan kepada pendatang dengan cara memasukkannya ke dalam struktur kesultanan, pemberian nama yang khas karena sejarah genealogisnya dari pendatang (Arab), juga merupakan wujud toleransi.

Kesultanan Banjar yang memiliki kekuasaan rela memberikan hak kepada golongan yang tidak memiliki kuasa adalah bukti adanya toleransi. Kerelaan itu didukung oleh umpan balik pendatang yang dengan penuh kesadaran menerima hak-hak yang diberikan,

selanjutnya bersikap menghargai pihak kesultanan dan orang pribumi pada umumnya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban. Inilah yang menjadikan akar toleransi cukup kuat di kesultanan dan masyarakat Banjar. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa toleransi itu diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat Banjar dan pendatang. Toleransi itu terjadi karena masing-masing merasakan manfaatnya, yaitu hidup damai dan tidak ada permusuhan. Kehidupan yang dijalankan dengan sikap toleran tersebut terekam pada data arkeologi berupa keberadaan etnis pendatang di tengah-tengah masyarakat pribumi tanpa menimbulkan gejolak.

Berkaitan dengan literatur sejarah, sikap toleran ditunjukkan dalam situasi yang berbeda ketika tercipta komunikasi antara Kesultanan Banjar dan Belanda. Kedatangan Belanda ke Banjar justru memaksakan aturan-aturan baru yang tidak jarang merugikan. Kekuasaan Belanda terhadap wilayah di Tatas (salah satu wilayah di Banjarmasin) awalnya adalah karena menyewa untuk kegiatan dagang. Akan tetapi kemudian minta ijin untuk membangun benteng (Nawawi, Ruslan, & Aziddin, 1986: 28) di tempat tersebut. Belanda akhirnya memiliki kekuatan yang besar, dan kemudian berani melakukan tekanan-tekanan kepada kesultanan serta melakukan monopoli perdagangan. Setelah sampai pada kondisi yang demikian dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya diterimalah klausul perjanjian (Anonim, 1965: 230–232) yang menyatakan bahwa kesultanan melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Belanda.

Pada masa-masa berikutnya, kekuasaan kesultanan berada dalam kontrol Belanda. Seorang putra mahkota dapat menggantikan sultan jika ada restu dari Belanda (Ajisaka, 2008). Tampaknya langkah-langkah yang dilakukan Belanda menjadikan kesultanan semakin lemah dan tidak merdeka. Dalam bidang perdangan juga demikian, semua lada dikuasi Belanda. Bahkan pedagang yang membawa lada harus mendapat ijin. Akan dibawa ke mana lada dari Banjarmasin, harus diketahui Belanda. Peraturan yang disebarluaskan adalah semua arus perdagangan lada harus sepengetahuan sultan, tetapi dalam praktik di lapangan yang melakukan pengawasan adalah Belanda yang mengatasnamakan sultan. Tampaknya ketidaksanggupan berbagi kekuasaan inilah yang menjadikan tidak muncul sikap toleransi pada masa Belanda.

Jika faktanya ada akar toleransi yang kuat dalam masyarakat Banjar, maka tantangan masyarakat Kalsel sekarang adalah tetap dapat mempertahankan sikap toleran itu. Sejauh ini yang sering dilakukan di lingkungan pendidikan adalah mengajarkan pengertian toleransi dan penerapannya dalam kehidupan.

Berkaitan dengan penerapannya, terdapat pandangan bahwa toleransi itu menghasilkan kesempatan yang lebih baik untuk hubungan antarpribadi dalam masyarakat majemuk. Namun sebenarnya terdapat potensi permasalahan dalam toleransi, yaitu sikap penerimaan atau penolakan keberadaannya terletak jauh di dalam pikiran, dan jiwa. Meski tidak serta merta menghasilkan kekerasan seperti halnya intoleransi, tetapi prasangka yang ditimbulkan berpotensi rawan kekerasan. Oleh karena itu, kerelaan menerima perbedaan semestinya tidak hanya dengan pembelajaran (monolog), tetapi melalui dialog. Pemikiran Schirrmacher tentang dialog memberi peluang untuk meraih kehidupan yang toleran atas dasar kebenaran-pertemuan-kebenaran (Benson, 2016: 313).

Namun tampaknya kebenaran itu selalu berkonteks dalam ruang dan waktu. Oleh karena itu pemikiran Schirrmacher masih harus dilanjutkan dalam satu langkah lagi, yaitu pertemuan lanjutan, sehingga konsepnya menjadi kebenaran-pertemuan-kebenaran-

pertemuan. Namun, penataan konsep tersebut tidak berada dalam lajur horizontal/linier, tetapi dalam lingkaran dialog. Maksudnya, kebenaran dari satu pihak harus didialogkan dengan pihak lain. Idealnya dialog itu akan menghasilkan kebenaran yang bisa diterima dari kedua belah pihak. Sampai tataran ini bisa diimplementasikan untuk mewujudkan toleransi. Akan tetapi, seiring dengan adanya perubahan-perubahan dan pandangan baru, tidak jarang kebenaran itu perlu didialogkan lagi untuk disepakati kebenaran berikutnya sehingga menemui konteksnya yang baru.

Dalam praktiknya hal itu harus diimplementasikan melalui dialog yang kuat pada tataran internal tiap-tiap kelompok etnis. Kristalisasi dari setiap jiwa kehidupan kelompok etnis itu kemudian dibawa pada dialog kehidupan bersama etnis-etnis se-Kalsel untuk ditemukan hal-hal yang dapat diterima oleh tiap-tiap kelompok etnis. Dialog itu tidak hanya sekali, dan tidak boleh berhenti, karena dimaksudkan untuk menemukan konteks yang sesuai dengan ruang dan waktunya. Tampaknya cara seperti inilah yang dapat dilakukan untuk terus menghidupkan dan memelihara toleransi di tengah-tengah kemajemukan masyarakat sekarang (dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Kalsel).

SIMPULAN

Hasil pembahasan membuktikan bahwa masyarakat dan pemerintahan Kesultanan Banjar saat itu telah mempraktikkan sikap toleran dalam kehidupan bersama para pendatang. Sikap tersebut terekam dalam bukti material (temuan arkeologi) yang masih dapat ditemukan di lapangan. Bekas tambang di Angsau, Pelaihari, rumah joglo yang biasanya dihuni orang Cina, Kampung Cina, dan Kampung Arab merupakan bukti adanya kebebasan beraktivitas dan bermukim bagi pendatang, di mana hak tersebut diperoleh karena diberikan oleh pribumi yang memegang kekuasaan.

Sikap toleran adalah warisan yang sangat berharga, yang dimiliki masyarakat Kalsel. Oleh karena itu, masyarakat perlu merawat, melestarikan dan terus-menerus mengimplementasikan sikap toleran. Perawatan dan pelestarian yang paling efektif adalah dengan mempraktikkannya dalam kehidupan. Akan tetapi, karena pengimplementasian itu dilakukan dalam sebuah praktik, maka perlu ada dialog kehidupan. Dialog kehidupan diwujudkan dengan mengkomunikasikan praksis kehidupan bersama dengan upaya memahami dan menghargai sikap pihak lain sebagai pribadi yang utuh. Dialog tersebut dilakukan dengan mengikuti alur lingkaran sehingga tidak akan pernah berhenti. Justru dengan dialog yang terus-menerus itu, toleransi akan menemui konteksnya dalam ruang dan waktu sehingga selalu relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajisaka, A. (2008). *Mengenal Pahlawan Indonesia (ed. Revisi)*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Anonim. (1965). *Surat-surat Perdjudjian Antara Kesultanan Bandjarmasin Dengan Pemerintahan-pemerintahan V.O.C., Bataafse Republik, Inggris dan Hindia-Belanda 1635-1860*. Djakarta: Arsip Nasional Republik Inddonesia Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat.
- Anonim. (2017). Hasil Penelitian, Banjarmasin Masuk Kota Intoleran. *Prokal.co*. Diambil dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/12662-hasil-penelitian-banjarmasin->

masuk-kota-intoleran/6

- Arifin, I., Musaddad, A., & Sudiyanto, S. (2019). Constructing Social Attitudes and Religious Tolerance in Emerald Diversity through the Teaching of Religion and Cultural Values. *Al-Ta'lim Journal*, 26(2), 147–159. <https://doi.org/10.15548/jt.v26i2.539>
- Benson, I. O. (2016). Theory and praxis of religious tolerance. *OGIRISI: a New Journal of African Studies*, 12(1), 293–318. <https://doi.org/10.4314/og.v12i1.16>
- Berger, R., Gelkopf, M., Heineberg, Y., & Zimbardo, P. (2016). A school-based intervention for reducing posttraumatic symptomatology and intolerance during political violence. *Journal of Educational Psychology*, 108(6), 761.
- Bleeker, P., Munnich, J., & Netscher, E. (1855). *Tijdschrift voor Indische taal land en Volkenkunde*. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=FPFAA A A A c A A J & dq=radja bandjar&pg=PA568#v=onepage&q=radja bandjar&f=true>.
- Bondan, A. H. K. (1953). *Suluh Sedjarah Kalimantan* (1 ed.). Banjarmasin: Fadjar.
- BPCB Kaltim. (2018). Rumah Tradisional Banjarmasin. Diambil 28 Agustus 2020, dari Indonesia Platform Kebudayaan website: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkalim/rumah-tradisional-banjarmasin/>
- Dijk, L. C. D. Van. (1862). Betrekkingen Der O. I. Compagnie Met Banjer-Massin. 1606—1660. In *Neêrlands vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochinchina* (hal. 1–129). Diambil dari https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QafcAOy_adMDUVRxIFs4B4O0m6JZ1T-bYsjMF7Kd2qWSZUNPw1wYOcU8jjNjWG7vV-s8xRG-3zafFhfT3FYLCzXjJk uAAkuQA5OnV2EpxdCrQ2tiwYAH0ZySMaQr8Rb-tdieh_3yJrfuJ6Xdvf8Sf_U6pJ36pgXD_K2cfozAve0ePh7AvsqIshkMUcIKMIABKdoU3
- Fong, G. Y. (1969). *Trade and Politics in Banjarmasin 1700-1747* (University of London). Diambil dari <https://core.ac.uk/download/pdf/160275798.pdf>.
- Goalwin, G. J. (2018). “Religion and Nation Are One”: Social Identity Complexity and the Roots of Religious Intolerance in Turkish Nationalism. *Social Science History*, 42(2), 161–182. <https://doi.org/DOI: 10.31235/osf.io/gdj43>.
- Groeneveldt, W. P. (2018). *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Harkantiningih, N. (2017). Seni Hias Tempel Keramik Kesultanan Cirebon: Toleransi Dalam Kebinekaan. *Kapata Arkeologi*, 13(2), 223–246. <https://doi.org/doi: 10.24832/kapata.v13i2.442>.
- Hollander, J. J. D. (1877). *Handleiding Bij De Beoefening Der Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie voor de Cadetten, Bestemd voor Den Dienst in Die Gewesten*. Te Breda: Koninklijke Militaire Academie.
- King, P. (1998). *Toleration*. London: Frank Cass Publishers.
- Lindblad, J. T. (2012). *Antara Dayak dan Belanda, sejarah ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan*. Malang dan Jakarta: Lilin Persada Press dan KITLV.
- Listiana, D. (2012). Permukiman Cina di Banjarmasin: Perkembangannya Hingga Awal

- Kemerdekaan. In *Potret Kampung-Kampung Pendatang di Banjarmasin* (hal. 1–130). Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Ludeking, E. W. A. (1871). *Recueil voor den militair geneeskundigen dienst in Nederlandsch-Indië*. Batavia: H.M. Van Dorp.
- Maghfiroh, F. (2019). *Toleransi Umat Beragama : Studi Posisi Umat Islam Di Kerajaan Majapahit* (Skripsi pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya). Diambil dari [http://digilib.uinsby.ac.id/31570/3/Faizul Maghfiroh_A92215083.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/31570/3/Faizul%20Maghfiroh_A92215083.pdf).
- Moore, D. (2000). Intolerance of “others” among Palestinian and Jewish students in Israel. *Sociological Inquiry*, 70(3), 280–312.
- Nawawi, R., Ruslan, T., & Aziddin, Y. (1986). *Sejarah Kota Banjarmasin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pinem, M. (2013). Masjid Pulo Kameng Akulturasi dan Toleransi Masyarakat Aceh. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 20(1), 87–98. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.18784/analisa.v20i1.8>.
- Powell, R., & Clarke Steve. (2013). Religion, Tolerance, and Intolerance: Views from Across the Disciplines. In S. Clarke, R. Powell, & J. Savulescu (Ed.), *Religion, intolerance, and conflict AnScientifict and Conceptual Investigation* (I, hal. 1–35). Oxford: Oxford University Press.
- Sahriansyah. (2015). *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar* (I). Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
- Saleh, M. I. (1977). *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan* (S. Kutoyo & S. Sutjiatiningsih, Ed.). Diambil dari [http://repositori.kemdikbud.go.id/7417/1/SEJARAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/7417/1/SEJARAH%20DAERAH%20KALIMANTAN%20SELATAN.pdf).
- Santiko, H. (2013). Toleransi Beragama dan Karakter Bangsa: Perspektif Arkeologi. *Sejarah dan Budaya, Tahun ke-7*(1), 1–8.
- Schwaner, C. A. L. M. (1853). *Beschrijving van het Stroomgebied van den Barito en Reizen Langs Eenige Voornamen Rivieren van het Zuid Oostelijk Gedeelte van dat Eiland*. Amsterdam: P.N. van Kampen.
- Sjamsuddin, H. (2014). *Pegustian dan Temenggung Akar Sosial, Politik, dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumaktoyo, N. (2018). Survei: Kalimantan Utara Paling Toleran, Aceh Paling Intoleran. *tirto.id*. Diambil dari <https://tirto.id/survei-kalimantan-utara-paling-toleran-aceh-paling-intoleran-cN2C>.
- Tim Peneliti. (2010). “Penelitian Perkembangan Kota Pelabuhan dan Wilayah Sekitarnya di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.” *Laporan Penelitian Arkeologi*, 1-32. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Wasita, W. (2008). Undang-undang dan Peraturan Adat: Gambaran Sikap Toleran dan Keterbukaan Masyarakat Kalimantan. *Naditira Widya*, 2(2), 251–262. <https://doi.org/10.24832/nw.v2i2.356>
- Wasita, W. (2018). Elemen Penting Dalam Logika Penelitian Arkeologi Kebinekaan. *Naditira Widya*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.24832/nw.v12i1.253>.

- Weiner, M. F. (2015). The Demography of Race and Ethnicity in The Netherlands: An Ambiguous History of Tolerance and Conflict. In R. Saenz, D. Embrick, & N. Rodrigues (Ed.), *The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity* (hal. 575–596). https://doi.org/10.1007/978-90-481-8891-8_27
- Widiastuti, K., & Oktaviana, A. (2012). Wujud Budaya Visual Arsitektur Etnis Tionghoa di Banjarmasin. *Jurnal Intekna, Tahun XII*(1), 1–9.